



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2018-2019
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke- :
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Dengan :  
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;  
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Senin, 11 Maret 2019
- Waktu : 14.00 WIB s.d 16.35 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
- Ketua Rapat : Melchias Markus Mekeng
- Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
- Acara : Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor
- Hadir : **PEMERINTAH:**
1. SRI MULYANI INDRAWATI (MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)
  2. AIRLANGGA HARTARTO (MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA)

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG/KETUA KOMISI XI/F-PG):**

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya,  
Yang terhormat saudara Menteri Perindustrian beserta jajarannya,  
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,  
Serta hadirin yang berbahagia.**

Berdasarkan catatan dari sekretariat, absensi telah ditandatangani oleh 11 orang Anggota dari 8 Fraksi dan ijin 2. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijin kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait konsultasi usulan perubahan pengelompokan/skema barang berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)**

#### **Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali Rapat Kerja kita pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri acara Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Agenda Rapat Kerja kita pada siang hari ini adalah konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberap kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Bahwa perubahan pengelompokan barang yang dikenai PPNBM dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, tanggal 8 Februari 2019, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada Ketua Komisi XI DPR RI dengan Nomor S121/MK010/2019 perihal permintaan waktu konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan di atas, maka dari itu kita mengadakan Rapat Kerja pada siang hari ini.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Menteri Keuangan untuk menyampaikan penjelasan tentang yang dimaksud.

Kami persilakan.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI.**

Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih bahwa pada hari ini kita dijadwalkan untuk melakukan Rapat Konsultasi mengenai skema PPNBM untuk kendaraan bermotor roda empat.

Kami ingin menyampaikan presentasi dan nanti dari Kementerian Perindustrian Bapak Menteri sendiri yang akan menyampaikan juga dari aspek Kementerian Perindustrian.

Pertama-tama sebagai latar belakang dari usulan untuk mengadakan Rapat Konsultasi mengenai pengenaan PPNBM kendaraan bermotor roda empat, kami sampaikan bahwa Menteri Perindustrian menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan, melalui surat Nomor 398/M-IND/IX/2017, tanggal 11 September 2017 mengenai usulan kebijakan fiskal industri otomotif di dalam rangka mendorong pengembangan kendaraan rendah karbon dan kendaraan listrik.

Menanggapi surat tersebut, kami telah melakukan pembahasan secara intensif pada level teknis antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan pelaku industry sepanjang tahun 2017 dan tahun 2018.

Pada perkembangannya sesudah beberapa kali pembahasan secara teknis, Menteri Perindustrian kembali menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 803/M-Industri/XII/2018, tertanggal 27 Desember 2018 mengenai usulan harmonisasi PPNBM dan bea masuk electrified vehicle kendaraan bermoto roda empat atau lebih. Di mana skema yang diusulkan telah dibahas di level teknis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) pengelompokkan barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan.

Oleh karena itu, kami menyampaikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan konsultasi dan diusulkan adanya perubahan pengelompokkan dari PPNBM untuk kendaraan bermotor roda empat. Perubahan pengelompokkan barang yang dikenakan PPNBM dalam hal ini perlu untuk kami konsultasikan dengan DPR RI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (3) bagian penjelasan.

Perubahan tersebut adalah pada saat ini *policy* mengenai PPNBM menyangkut dengan melakukan perhitungan PPNBM berdasarkan kapasitas mesin. Untuk usulan perubahannya maka penghitungan PPNBM tidak berdasarkan kapasitas mesin, namun berdasarkan konsumsi bahan bakar dan emisi Co2.

*Policy* saat ini pengelompokkan kendaraan penumpang berdasarkan sistem penggerak, yaitu 4x2 dan 4x4 serta jumlah penumpang, yaitu dikelompokkan antara sedan, penumpang di bawah 10 dan antara 10-15. Di dalam usulan perubahan yang baru pengelompokkan kendaraan penumpang tidak membedakan sistem penggerak, namun hanya berdasarkan jumlah penumpang, yaitu yang di bawah 10 dan di atas 10 orang penumpang.

Aspek ketiga yang berubah adalah terdapat insentif untuk program KPH2 atau Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau atau LCGC sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Di dalam usulan perubahan masih terdapat insentif namun berubah, yaitu untuk program rendah emisi karbon atau *low carbon emission vehicle* atau LCEV yang terdiri dari KBH2 tadi, yaitu kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau, hybrid, flexi engine dan kendaraan listrik.

Untuk sebagai latar belakang bagi Komisi XI DPR RI di dalam melakukan Rapat Konsultasi, kami menyampaikan data secara makro. Industry alat angkut memiliki kontribusi yang sebetulnya masih sangat kecil terhadap PBB, dengan demikian dia memiliki juga potensi untuk meningkat dari sisi ekspor. Saat ini di dalam PDB kita kontribusi industry pengolahan adalah 19,86. Industry pengolahan non migas sendiri kontribusinya adalah 17,63% di mana industry alat angkut hanya memiliki kontribusi sebesar 1,76% atau nilai nominalnya 260,9 triliun.

Oleh karena itu, kami melihat dari basis yang masih kecil terdapat potensi ekspor dari kendaraan bermotor dan untuk itu Indonesia perlu untuk mendorong industry alat angkut dengan teknologi yang lebih kompetitif untuk mendorong pertumbuhan industry dalam negeri dan juga meningkatkan ekspor. Ini sesuai juga dengan konsen secara global mengenai *claimed change* di mana emisi Co2 menjadi salah satu faktor yang sekarang menjadi perhitungan di dalam industry otomotif.

Di dalam halaman selanjutnya, kami sampaikan peranan dari industry otomotif secara lebih detail. Pertama, adalah jumlah dari produksi CBU (*Completely Built Up*) dari tahun 2013 hingga tahun 2018 antara yang diekspor dengan yang diimpor itu adalah gambar nomor 1.

Kemudian yang nomor 2 adalah mengenai jumlah produksi *Completely Knocked Down*, baik yang diekspor dengan yang diimpor. Kalau yang di CBU tadi jumlah ekspor dalam hal ini mengalami peningkatan dan terjadi kecenderungan meningkat, yang tadinya 171 ribu tahun 2013 dan tahun 2018 sudah mencapai 265 ribu. Sementara CBU dalam bentuk impor justru mengalami penurunan atau stagnan dari 150 ribu tahun 2013 menjadi hanya 84 ribu pada tahun 2018.

Untuk *Completely Knocked Down*, kita juga melihat dalam hal ini adanya perubahan baik untuk yang ekspor maupun impor. Di mana untuk peranan impornya masih lebih tinggi dari yang kita ekspor. Ini adalah kalau jumlah yang ungu adalah CKD yang ekspor dan yang peach adalah CKD untuk impor.

Kalau kita lihat chart yang ketiga untuk *parts* jumlah cenderung mengalami kenaikan bahkan kenaikannya sangat tinggi tahun 2017 dan tahun 2018. Dalam hal ini, ekspor dari *parts* kita mengalami pelonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2017 dan 2018, sementara impornya relative masih hampir stabil. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat dari sisi nilai kalau yang di atas semuanya adalah dalam bentuk unit, dari sisi nilainya ekspor dari kendaraan bermotor roda empat adalah lebih tinggi mencapai 3,5 billion US Dolar dibandingkan impornya yang mengalami kenaikan dalam tahun terakhir dari 580 juta menjadi 2,5 billion US Dolar.

Oleh karena itu, dari gambar ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor roda empat menyumbang surplus neraca perdagangan. Untuk CBU dan ... volume ekspor lebih besar dari impor dan juga mengalami trend yang meningkat. Untuk CKD volum impor lebih besar daripada ekspor sehingga terdapat potensi untuk terjadinya industry subsitusi impor. Dan TKDN perlu untuk ditingkan, untuk itu industrialisasi dari komponen utama kendaraan bermotor perlu untuk dibangun dan ini ada *policy* untuk mendukung upaya tersebut.

Untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri kalau kita lihat perbandingan Indonesia dan Thailand dari sisi jumlah produksi dan penjualan domestic maupun ekpor kita terlihat dalam hal ini Indonesia masih tertinggal dibandingkan Thailand, meskipun kita memiliki domestic market yang cukup besar, namun kita belum bisa melakukan peningkatan ekspor yang berarti kita perlu untuk menumbuhkan industry di dalam negeri.

Untuk mencapai kalau ini ada yang di atas adalah dari Kementerian Perindustrian yang nanti Bapak Menteri Perindustrian bisa menyampaikan target produksi dan penjualan domestic serta ekspornya. Apabila kita ingin mencapai target dari Kementerian Industri itu secara implisit berarti pertumbuhan produksi harus sebesar 6,63% per tahun dan penjualan harus tumbuh 4,67% dengan pertumbuhan ekspor mencapai 10,7.

Kalau kita lihat periode 2010 hingga 2018, bahkan periode yang paling tinggi tahun 2010 sampai 2014, maka pertumbuhan penjualan kita hanya 3,24 dengan pertumbuhan ekspor 6,94 dan pertumbuhan penjualan sebesar 5,89 itu berarti masih di bawah apa yang ditargetkan oleh Kementerian Perindustrian.

Penjualan kendaraan bermotor sampai hari ini adalah dikenakan dua untuk pajaknya, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Untuk PPN barang mewah dikenakan terhadap barang yang termasuk dalam katagori bukan kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dan dikonsumsi masyarakat yang cenderung memiliki penghasilan tinggi dan/atau untuk menunjukkan suatu status. Ini adalah penjelasan Pasal 8 untuk Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

PPN dan PPNBM sampai saat ini menyumbangkan masing-masing sebesar 39,6% dari penerimaan perpajakan tahun 2018 dan 1,29% dari total untuk PPNBM-nya dari penerimaan perpajakan di tahun 2018. Artinya, PPNBM itu kontribusinya kurang dari 2% total penerimaan perpajakan kita. Penerimaan PPNBM yang tadi sebesar hanya 1,29% dari total penerimaan perpajakan didominasi oleh kendaraan bermotor, yaitu sekitar 94% dari total penerimaan PPNBM sebesar Rp15,9 triliun.

Sampai hari ini klasifikasi kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan barang mewah adalah untuk kendaraan penumpang adalah kendaraan yang diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu kendaraan penumpang yang berkategori kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau atau dalam singkatannya KBH2. Kemudian kendaraan sedan, kemudian klasifikasi kendaraan penumpang dengan jumlah penumpang di bawah 10 dengan jenis mesin 4x2 dan kendaraan penumpang di bawah 10 penumpang dengan jenis mesin 4x4 dan penumpang di atas 10 hingga 15 orang. Kemudian klasifikasi kedua adalah kendaraan komersial, yaitu double cabin.

Untuk skema PPNBM yang akan diubah, maka kami menyampaikan di dalam table ini untuk mempermudah penjelasan. Dasar pengenaan berdasarkan PPNBM yang saat ini adalah berdasarkan kapasitas mesin. Untuk perubahannya nanti akan diubah menjadi berdasarkan konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi CO2. Jadi nanti tidak ada lagi kapasitas mesin.

Pengelompokkan kapasitas mesin yang dalam hal ini dikelompokkan untuk diesel di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu di bawah 1500, 1500 hingga 2500, hingga di atas 2500 cc. Dan untuk yang bahan bakarnya gasoline dibagi menjadi 4 kelompok di bawah 1500, 1500-2500, 2500-3000 dan di atas 3000 cc nanti di dalam perubahannya hanya akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu di bawah 3000 cc dan di atas 3000 cc.

Untuk pengelompokkan tipe kendaraan di dalam peraturan yang sekarang ini adalah dibagi antara sedan dan non sedan. Nanti di dalam perubahan tidak lagi dibedakan antara sedan dan non sedan. Prinsip pengenaan PPNBM di dalam peraturan saat ini semakin besar cc-nya akan semakin tinggi tarif pajaknya, karena ini dianggap lebih luxury, lebih mewah yang cc-nya semakin tinggi. Nanti di dalam perubahannya akan di dasarkan pada emisi, yaitu semakin rendah emisinya maka semakin rendah tarif pajaknya.

Dan untuk program saat ini masih ada insentif yang tadi kami sebutkan konsumsi kendaraan yang hemat energi dan harga terjangkau. Nanti akan ada perubahan jauh lebih detail pembagian atau perbedaannya untuk yang kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau. Kemudian ada kelompok hybrid electric vehicle, plug in hybrid electric vehicle, flexi engine dan electric vehicle. Saya kayaknya sudah jago sekali padahal saya tidak mengerti, nanti Bapak Menteri yang menyampaikan, tapi kira-kira saya bisa baca.

Jenis kendaraan yang masuk di dalam program ini adalah jenis kendaraan yang termasuk dalam kategori low carbon emission vehicle yang diusulkan untuk diberikan insentif tarif PPNBM-nya lebih besar apabila mereka mengikuti program tadi yang disebutkan program tadi insentif yang kami sebutkan pada baris yang terakhir. Insentif diberikan melalui kriteria tertentu, kalau kita lihat singkatannya yang sebelah kiri itu tadi yang tadi saya sampaikan KBH2, hybrid electric vehicle, plug in hybrid electric vehicle dan fuel cell electric vehicle. Nah, ini yang kita sebutkan dari sisi informasi dan sumber energi mereka dan kebutuhan infrastrukturnya. Nanti Bapak Menteri Industri yang akan bisa menyampaikan.

Nah, dua yang terakhir kami akan sampaikan 3 perbandingan antara skema PPNBM dari peraturan saat ini dibandingkan yang akan diusulkan untuk diubah. Untuk peraturan yang saat ini kami sampaikan di sebelah kiri, yaitu yang tadi disebutkan dibagi antara passenger car dan commercial vehicle dan dalam hal ini dibedakan antara engine kapasitasnya berdasarkan cc-nya semakin tinggi cc-nya semakin tinggi. Kalau dilihat ada yang bahkan PPNBM-nya mencapai 125% untuk sedan yang gasoline maupun yang diesel yang kapasitasnya di atas 2500 cc atau di atas 3000. Tadi yang di sana itu seperti diesel di atas 2500 sudah terkena PPNBM 125 dan untuk gasoline yang di atas 3000 dapat 125.

Untuk yang passenger car yang di bawah 10 passenger maupun yang dengan 4x2 dan 4x4 kita juga lihat ada yang mendapatkan PPNBM mencapai 125, itu adalah peraturan yang sekarang ini. Nah, peraturan yang baru kalau kita lihat kolomnya dibagi berdasarkan Co2 emission-nya dan dalam hal ini dibagi juga dalam bentuk cc-nya. Dia itu yang tadi dibagi hanya di bawah 3000 dan di atas 3000, kalau kita lihat cuma ada dua kolom yang paling kanan. Jadi lebih simple pembagiannya, namun jenis vehicle nya nanti yang disebut yang sebelah kiri ini yang tadi program itu akan mendapatkan beberapa insentif.

Kalau diperhatikan yang paling penting juga PPNBM yang sebelah kiri ada yang mencapai 125 dan di sebelah kanan paling tinggi hanya 70%, yaitu untuk passenger car di bawah 10 penumpangnya dengan cc di atas 3000 dan mereka yang memiliki emission di atas 250. Itu yang paling tinggi yaitu 70% PPNBM, yang lainnya ada dibawahnya yaitu 60, 50, 40. Jadi passenger car yang di bawah 10 penumpang itu PPNBM paling tinggi ada 70% untuk yang vehicle dengan cc di atas 3000 dan dengan jumlah Co2 emission di atas 250. Sementara yang di bawah itu kita lihat PPNBM-nya adalah antara 40, 50, 60 untuk yang di atas 3000 atau 15, 20 dan 25 untuk yang cc-nya di bawah 3000.

Demikian juga untuk yang komersial car kita lihat jumlah tingkat PPNBM-nya juga mengalami penurunan. Dan yang terakhir untuk yang program kami sampaikan di bawah ini adalah bentuk untuk insentif yang semakin tinggi penggunaan non fuel-nya dia akan mendapatkan insentif dalam bentuk PPNBM 0%. Itu artinya, dia akan semakin menggunakan listrik.

Untuk kami sampaikan saja di Komisi XI DPR RI ini bahwa sebetulnya instrument fiskal di dalam rangka untuk mengatur konsumsi sekarang ini dikenal dua, yaitu PPNBM yaitu pajak penjualan barang mewah dan yang kedua atau cukai, makanya kami punya Dirjen Bea Cukai duduk di sini dan PPNBM. Sebetulnya instrument untuk mengurangi konsumsi itu bisa digunakan PPNBM yang tadi disampaikan, yaitu kalau untuk komoditas yang dianggap dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi atau mencerminkan status atau kita bisa menggunakan cukai di mana cukai itu tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi untuk barang yang memang dianggap perlu untuk dikurangi konsumsinya. Jadi dalam hal ini kami juga ingin sampaikan bahwa instrument fiskal kita tidak hanya dalam bentuk BBM tetapi bisa juga dalam bentuk cukai.

Nah, yang terakhir kami ingin sampaikan sesudah melakukan analisa berdasarkan penerimaan PPNBM kita untuk tahun 2016 dan tahun 2017, apabila kita melakukan skema kebijakan yang baru dengan tadi table yang sebelah kanan, maka penerimaan negara kita dari pajak ini, yaitu PPNBM akan lebih tinggi dibandingkan apabila dengan peraturan yang lama. Dan dengan adanya perbedaan *treatment* kita berharap produksi kendaraan tipe sedan di mana tarif PPNBM-nya untuk sedan lebih rendah akan dapat mendorong terjadinya industrialisasi di dalam negeri.

Simulasi ini menunjukkan untuk penerimaan PPNBM tahun 2016 dari tipe kendaraan 4x2 dan kendaraan tipe sedan dengan peraturan yang sekarang eksisting dibandingkan dengan peraturan yang baru akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar, yaitu yang tadinya PPNBM-nya 18,4 triliun kalau digunakan skema baru penerimaannya adalah 24,95. Dan untuk tahun 2007 dari 15,7 kalau digunakan PPNBM yang baru maka penerimaan akan mencapai 23,46 triliun.

Kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan merupakan elastisitas ini hanya menunjukkan bahwa dengan volume yang sama, penjualan yang sama apabila digunakan PPNBM skema yang baru, maka kita akan mendapatkan penerimaan yang lebih besar. Namun, kita belum menghitung apabila terjadi perubahan demand. Jadi yang disebut elastisitas yang kami belum hitung di dalam table ini.

Untuk PPNBM tahun 2019-2022 kami melakukan proyeksi apabila dengan asumsi penjualan adalah sesuai dengan rata-rata pertumbuhan penjualan selama tahun 2015-2017, yaitu sebesar 3% dengan *share* dari kelompok kendaraan KBH2 dengan yang LCEB adalah 25% dan 10%. Maka kita lihat bahwa penerimaan dengan tarif eksisting dibandingkan dengan tarif baru tetap memberikan pendapatan yang lebih besar, yaitu 1,1 untuk penjualan juta unit dengan penerimaan 17,8 apabila kita menggunakan tarif 2019 hingga 2020 untuk eksisting dan untuk tarif baru kita akan mendapatkan 26,2 dan 27,8 mulai tahun 2021 dengan jumlah penjualan yang meningkat sebesar 3% sesuai dengan rata-rata pertumbuhan penjualan tahun 2015-2017.

Untuk penjualan yang sesuai dengan targetnya Bapak Menteri Perindustrian di mana disebutkan untuk tahun 2020 akan tercapai 1,25 juta dan 2025 1,69 juta unit maka penerimaan berdasarkan tarif yang baru juga tetap lebih tinggi, yaitu 29,5 triliun dan 32,3 triliun.

Demikian Pimpinan, maka kami menyampaikan surat untuk mendapatkan konsultasi dari Komisi XI DPR RI mengenai perubahan PPNBM kendaraan bermotor di dalam rangka untuk memenuhi penjelasan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Dan ini produknya adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang harus melalui konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari kami adalah demikian, kalau diijinkan dari Kementerian Perindustrian Bapak Menteri untuk menyampaikan Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Harus dikasih, Ketua Umum saya gimana Ibu.  
Silakan Bapak Menteri.



## **MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Terima kasih.

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.**

Kebetulan Ibu Menteri ini alumni saya ada di sini Ibu.

**Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati beserta jajarannya.**

Dari paparan Ibu Menteri Keuangan sebetulnya sudah jelas semuanya. Dan saya sangat kagum Ibu Menteri sudah sangat menjadi penggemar otomotif, menguasai dan fasih. Dan mohon maaf Bapak Profesor, bahwa tadi Ibu bolak balik bicara 4x2 atau 4x4 itu karena itu jumlah ban Pak, jadi tidak bisa ditambahi Pak.

Baik, terima kasih.

Jadi saya tidak akan menyentuh yang tadi Ibu sudah sampaikan hanya saya memberikan tambahan *highlight* saja mengenai industry ini. lanjut saja, tadi disampaikan Ibu kontribusinya terhadap PDB keseluruhan tetapi industry otomotif ini kalau kita bandingkan di sektor terhadap industry non migas ini kontribusinya sekitar 9,98%.

Nah, kemudian kalau kita lihat dari unitnya roda 4 ini produksinya 1,3 juta nilainya 13,7 billion. Dan eksportnya ke mancanegara 346 ribu atau 4,7 billion di Asean 297 ribu unit atau 2,3 billion impornya kita impor 198 ribu atau 3,4 dan 40 ribu Asean. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan.

Kemudian selanjutnya halaman berikut saja, perbandingan Indonesia dengan Thailand. Jadi kalau kita lihat Thailand produksinya lebih tinggi dari Indonesia 2,1 juta eksportnya juga lebih tinggi dari Indonesia 1,1 juta. Sedangkan Indonesia produksinya 1,3 juta dan eksportnya 346 ribu. Nah, kalau presentasinya mereka ekspor 53% dan Indonesia eksportnya 26%. Dan sebagai catatan Thailand sudah memiliki free trade agreement dengan Australia, New Zeland, India, Jepang, Peru, Chili, sedangkan Indonesia baru dengan Jepang, Pakistan, Chili, EFTA Eropa dan kemarin dengan Australia baru ditandatangani. Jadi membutuhkan ratifikasi berikutnya.

Nah, kemudian lanjutnya berdasarkan katagori itu kita lihat bahwa ekspor daripada Thailand itu kebanyakan adalah pick up dan 1 ton, kemudian passanger SUV dan sedan. Ini yang membedakan dengan Indonesia di mana Indonesia ekspor terbesar adalah MPV, MPV itu Kijang dan kelompoknya yang 7 penumpang. Kemudian SUV, Hatchback Indonesia produksi sedan ekspor 9% dan truck.

Nah, selanjutnya kalau kita lihat potensi daripada penandatanganan IA CEPA, Indonesia mempunyai potensi untuk mengekspor otomotif karena seluruh pabrik di Australia ini semuanya tutup dan berdasarkan CEPA post tarif Indonesia dengan Australia dinolkan semua. Jadi dengan demikian potensi pasar otomotif 1,1 juta yang di mana mereka adalah terbanyak di dominasi oleh sedanm, yaitu ada Camry, ada Mazda dan yang lain ini menjadi potensi untuk Indonesia.

Nah, kalau tadi Ibu Menteri Keuangan sudah menjelaskan terkait dengan jenis-jenis kendaraan. Nah, mungkin ini grafisnya kami sampaikan bahwa ke depan yang disebut battery electric vehicle itu ukuran kendaraannya bisa dilihat untuk battery emission itu kebanyakan untuk city car atau mobil personal atau commuter jarak pendek. Kemudian yang hybrid atau plug in hybrid itu dalam bentuk sedan atau bus yang jarak menengah. Sedangkan untuk yang lebih berat itu menggunakan battery tetapi namanya fuel cell technology, karena itu membutuhkan tenaga lebih besar.

Nah, ini yang dikembangkan juga oleh kebijakan yang tadi di sebut baik itu untuk battery, hybrid, fuel cell maupun flexi engine. Flexi engine itu berdasarkan basis daripada gasoline akan tetapi renewable seperti yang dibicarakan oleh Indonesia dalam bentuk bio fuel.

Lanjut, ini yang menjadi dampak PPNBM terhadap produksi hari ini. Kita melihat di sebelah kiri itu 0-125 itu eksisting policy atau kebijakan hari ini dan tentu berdampak kepada produksinya. Jadi yang PPNBM-nya 0 sampai 20% sebagai contoh tadi kendaraan LCGC atau kendaraan seven seater yang kecil yang itu produksinya 431 ribu dan *market*-nya 40%, *local content*-nya 95%. Nah, emisinya itu rata-rata di atas 200 atau di bawah 200, 120 dengan konsumsi per liter 20 KM per liter. Kalau truck dan bus emisinya lebih besar lagi 200 dan konsumsi liternya 11,6.

Yang PPN-nya 10% antara lain yang 4x2 di bawah 1500 cc itu jumlahnya 467 ribu. Nah, *market share*-nya 44% kemudian *local content*, kemudian *local production*-nya 90% emisi rata-ratanya 180 dan liternya 12,8. Nah, mereka yang 20% PPNBM 4x2 mulai dari MPV, SUV dan *double cabin* itu penjualannya mulai turun 144 ribu, *market share*-nya 13,8 kemudian *local production*-nya 75% dan *average Co2*-nya 255 gram per kilo meter atau di atas per liter 9 kilo meter. Nah, begitu mereka masuk yang cc lebih besar sedan misalnya 30%, maka penjualannya langsung *drop* 2400. Demikian pula yang 40% kendaraan yang mewah, kemudian juga yang 125% yang mewah jumlahnya kecil.

Oleh karena itu, harapannya dengan kebijakan harmonisasi PPNBM ini kita bisa untuk menyederhanakan prosedur tetapi dari sini kita bisa mendorong kebijakan agar sedan bisa diproduksi karena itu adalah *market* terbesar ekspor adalah sedan. Ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, di mana di sini jelasnya nanti program passenger vehicle, commercial dan electric vehicle di mana bea masuknya berbasis kepada standar emisi dan khusus untuk program electric vehicle bea masuknya atau PPNBM-nya relative lebih rendah. Tetapi untuk yang cc besar atau yang mewah itu PPNBM-nya tadi berkisar antara 20% sampai dengan 70%. Sedangkan khusus untuk program electric vehicle itu PPNBM yang setara dengan 3000 cc itu adalah 20% sampai dengan 30%.

Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan.

Terima kasih Pimpinan.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Ini harus apa yang ingin kita penjelasan.

Kami persilakan kepada Bapak Ecky.

## **F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati saudara Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan rekan-rekan sekalian.**

Prinsipnya kita dukung meningkatnya industrialisasi di Indonesia, termasuk sektor otomotif. Juga setiap kebijakan yang mendorong tumbuhnya ekspor produksi kita. Namun, kita paham bahwa berbicara soal perpajakan juga berbicara unsur keadilan. Saya mengerti bahwa tentu ini sudah dipertimbangkan oleh Pemerintah ketika disimulasi ternyata penerimaan negaranya bertambah kalau pakai sistem yang baru. walaupun saya sih perlu detailnya apa betul asumsinya ngitungnya benar lah. Tapi tingkat elastisitas orang nanti berubah menjadi kendaraan yang dalam tanda petik mendapat insentif fiskal ini juga harusnya dihitung atau di tax ratio elastisitasnya.

Yang kedua, saya juga mendukung bahwa kita harus mengurangi kontributor polusi dari kendaraan bermotor ini, tapi kita jelas ingin bahwa Indonesia ini betul-betul negara yang bukan hanya dijadikan *market*. Ketika misalnya dikaitkan terkait dengan bea masuk akan di nolkan dan seterusnya tentu ini cenderung mendorong untuk impor. Mungkin perlu untuk mengenalkan produk-produknya tapi tentu pada produk-produk otomotif atau kelas yang memang sesuai dengan menjaga rasa keadilan tersebut dan yang memang akan diproduksi pada para peserta manufaktur peserta program ini yang akan diproduksi disini.

Saya mengusulkan konkritnya seperti ini, pertama terkait dengan usulan perubahan ini dalam hal prinsip pengenaan tetap menurut pendapat saya ada di masukkan semakin besar cc semakin tinggi tarif pajaknya. Tetapi ditambah dengan semakin rendah emisi semakin rendah tarif pajaknya. Jadi kombinasi itu tetap, ketika bisa dinaikkan menjadi batasannya untuk gasoline menjadi 3000 cc hanya disederhanakan 3000 dan di atas 3000, menurut saya kurang tepat ya. Tetap saja 2000 untuk gasoline dan 2500 untuk diesel itu sudah pas, tetapi nanti yang kebawahnya itu disederhanakan dan yang keatasnya juga disederhanakan. Karena apa? karena memang walaupun tadi terkait dengan volume penjualan yang disampaikan Bapak Menteri Perindustrian kenapa MPV dan LCGC itu lebih banyak jumlah penjualannya, karena memang kapasitas dan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia memang lebih banyak yang disitu. Itu juga nyambung dengan nanti fasilitas kredit yang diberikan, nyambung juga dengan rata-rata penghasilan. Ini

orang pajak paham ini, rata-rata penghasilan yang mengambil kredit terkait dengan LCGC, kan begitu. Dan LCGC ini memang kita paham betul waktu itu Pak Menteri waktu masih disini ketika masih memimpin Komisi VI DPR RI itu kita dorong betul supaya industrialisasinya ada di Indonesia. Jadi kita dorong insentif fiskal pada waktu itu.

Karenanya kebijakan ini jangan sampai membuat industry yang sudah menginvestasikan untuk LCGC ya, karena ada skema baru cc-nya dinaikkan itu menjadi terdiluasi nanti penjualannya atau berkurang penjualannya. Kita sih lebih baik mendorong misalnya LCGC ini tingkat emisinya diturunkan, tingkat polusinya diturunkan, emisinya diperbaiki, kemudian kualitasnya juga diperbaiki. Insentif fiskal kesitu belum terlihat disini.

Adapun mereka misalnya mereka mau katakanlah di orientasi ekspor, kita harus mempelajari sesungguhnya. Misalnya kita berikan insentif kepada produk-produk yang memang akan di ekspor bukan untuk produk yang akan dijual di Indonesia kalau untuk kelas sedan misalnya 3000 cc ke atas.

Yang kedua, selain memasukkan prinsip pengenaan tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan usulan saya adalah skema perhitungan yang diajukan pada usulan perubahan itu disertai kalau bisa simulasinya agar lebih paham.

### **Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.**

Saya memandang kalau yang ditangkap adalah tujuannya bagus adalah untuk mengurangi polusi, untuk meningkatkan green card. Akan tetapi kalau dipandang bahwa seolah-olah insentif fiskal ini adalah justru untuk dalam tanda petik golongan-golongan yang menengah atas, itu kan kontra produktif dengan persepsi yang dibangun oleh Pemerintah saat ini. Jadi hemat saya harus, saya mendukung kebijakan insentif fiskal untuk mobil-mobil yang berbasis listrik dan memiliki beberapa keunggulan di dalam masalah *green car*, dalam masalah bebas polusi. Tetapi harus hati-hati jangan sampai justru filosofi pajak, yaitu mengedepankan asas keadilan redistribusi *income* dari orang-orang yang mempunyai kepada orang yang tidak mempunyai itu tercederai ketika dengan mengambil kebijakan ini.

Terima kasih Pimpinan.

Jadi konkritnya adalah saya sih tetap dimasukkan batasnya 2000 cc. Kemudian untuk bea masuk tetap dikenakan kepada mobil-mobil yang cc-nya tinggi, kecuali memang mobil-mobil yang akan diproduksi sebagai dalam tanda petik sample bagi masyarakat, seperti inilah mobil listrik itu yang akan diproduksi disini di Indonesia.

Demikian Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Pak Amir Uskara, Bapak Agung Rai.

**F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Perindustrian beserta jajaran yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Salam sejahtera untuk kita semua,**

**Selamat siang,**

*Om swasti astu.*

Memperhatikan apa yang disampaikan pamaran oleh Ibu Menteri bersama Bapak Menteri, di mana keinginan kita adalah mungkin keinginan kita bersama untuk mengurangi emisi karbon yang di dalam negeri kita. Di samping itu sudah ada *claimed change* juga. Tentunya ini satu hal yang memang positif sekali untuk mengurangi polusi-polusi atau polutan di perjalanan ini.

Nah, tentunya kalau kita melihat dari perkembangan-perkembangan yang akan dilakukan dan tidak terjadi penurunan penerimaan negara dalam hal ini baik tariff eksisting maupun tariff baru justru akan menambah dari penerimaan negara kita. Kalau kita melihat dari perkembangan dari tahun ke tahun kita mengharapkan ini Memperindag juga melakukan perubahan-perubahan bila perlu kita lebih banyak yang listrik nanti kedepannya, sehingga polusi ini bisa udara kita agak bersih, lebih bersih dari sebelumnya. Namun, tidak akan mengurangi perpajakan atau penerimaan kita. Bagaimana kita bisa boleh masuk dalam CKD maupun CBO ataupun yang diproses yang sudah hampir 100% dikelola di dalam negeri kita, namun tentunya terhadap penerimaan kita tidak akan mengalami penurunan.

Pada prinsipnya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan ini, tentunya bisa kita pahami sekali terhadap rencana-rencana dan kinerja yang akan dilakukan ke depan dengan tidak mengurangi atau tidak akan terjadi penurunan penerimaan. Nah, pada prinsipnya kami sependapat dengan usulan-usulan dari Pemerintah agar penerimaan kita juga meningkat dengan masuknya kendaraan-kendaraan yang berkualitas. Berkualitas ini dalam arti jangan sekedar murah, namun bikin macet di tengah jalan sehingga ada juga yang walaupun baru namun membikin sesak perjalanannya. Nah, bagaimana upaya-upaya dilakukan oleh Pemerintah khususnya dari Memperin ini melihat kroditnya pembangunan jalan dengan adanya kendaraan yang lebih banyak, namun di satu sisi kita tidak hanya semata-mata melihat penghasilan untuk pajak kita. Kita juga lihat di lapangan begitu mudahnya orang mendapatkan kendaraan, namun di satu sisi bikin macet di jalanan ini juga harus bisa dihindari. Nah, bagaimana upaya dari Memperin, kalau dari Ibu Menteri Keuangan saya rasa sudah selesai. Dari Memperin ini bagaimana bisa menyasati populasi dari kendaraan ini. Bila perlu yang lama-lama ini mungkin bisa dimasukkan sebagai barang kilon, mungkin ada batas waktunya sehingga tidak sesak di jalan.

Saya kira usulan itu saja Pimpinan, tidak ada yang terlalu mendesak. Pada prinsipnya apa yang disampaikan ini tidak mengurangi penerimaan kita, justru meningkatkan penerimaan kita.

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.  
Bapak Sarmuji.

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

**Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Perindustrian yang saya hormati beserta jajarannya.**

Focus saya nyaris sama dengan Bapak Ecky tadi, tentu aspek-aspeknya kami yakin sudah dihitung. Pertama, karena ini pajak tentu pendapatan negara yang sudah dimulasikan itu menjadi perhatian. Yang kedua, aspek keadilan. Yang ketiga, aspek inovasi untuk masa depan. Dan bagi saya, sebenarnya kalau Bapak Ecky tadi barangkali focus perhatiannya itu bersifat kumulatif, kalau saya tidak perlu bersifat kumulatif. Artinya, kalau ada satu point yang bisa kita ambil, bisa kita tingkatkan untuk masalah ini, kami pun bisa menerima. Misalnya begini, kita ini terlalu pelit untuk melakukan investasi di bidang inovasi dan teknologi. Kita mengeluarkan duit untuk investasi, inovasi, dan teknologi ini cenderung berhemat sekali. Termasuk dalam hal memberikan insentif-insentif semacam ini. Kalau untuk inovasi dan teknologi yang ini sangat berpengaruh bagi capaian bangsa Indonesia ke depan, andaikan disimulasikan ada sedikit penurunan pendapatan negara, bagi saya pribadi kami masih bisa terima. Apalagi setelah disimulasikan itu ternyata tidak mengurangi pendapatan negara justru menambah pendapat negara. Tentu bagi saya ini sangat masuk akal untuk kita dukung.

Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Pak Hatari.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih.

**Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya,  
Bapak Menteri Perindustrian yang saya hormati beserta jajarannya.**

Semangat dari Pemerintah untuk memperbaiki skema daripada tariff pajak khususnya industry otomotif. Mudah-mudahan ini sejalan dengan hampir 20 kebijakan paket ekonomi atau kurang dari 4 kebijakan itu sudah mencapai 10 kebijakan paket ekonomi. Tetapi diakui bahwa kinerja ekspor kita juga masih belum sesuai dengan harapan, ini harus kita sepakat.

Kemudian Ibu Menteri, saya mencoret-coret tadi angka di halaman 5 yang Ibu Menteri presentasi terkait dengan tadi Bapak Ecky dan Bapak Sarmuji, simulasi skema baru dengan 2016, 2017 kemudian simulasi proyeksi penerimaan dari sector pajak penjualan barang mewah ini. Untuk 2019 dan 2020 ada beberapa scenario disini, saya mengambil contoh 2019 itu pendapatan dari PPNBM ini kurang lebih 9,1 dan 2020 20,2 saya pikir realistis. Sementara 2020 ke 2021 inikan hanya setahun, saya hitung disini loncatannya sangat spektakuler atau kurang lebih 9,3%. Jangan sampai nanti *forcase* ini kemudian meleset terlalu jauh. 2021 ke 2022 saya pikir kenaikannya realistis. Yang saya soroti disini dari 20 ke 29,5 tinggi sekali Ibu, mudah-mudahan ada rumusnya dari Kementerian Keuangan. Itu yang saya ingin *sharing*.

Terkait dengan Bapak Menteri Perindustrian, apakah perangkat dari uji emisi CO2 ini sudah disiapkan oleh pihak Kementerian Perindustrian, itu satu. Yang berikut Bapak Menteri tadi mencontohkan beberapa negara, saya ingin mengkomparasi seperti di Jepang. Kami dulu di Sorong membelikan mobil bekas dalam jumlah ribuan, ketika Luhut Panjaitan ini menjadi Menteri Perindustrian. Jadi di Jepang itu kalau kendaraan berusia sudah mencapai 6 tahun tidak lagi berkeliaran di jalan raya. Jadi terkait dengan perbaikan tariff ini bukan hanya karena cc kendaraannya tinggi rendah akan tetapi usia dari kendaraan itu juga menjadi factor.

Di Inggris juga misalnya 8 tahun kendaraan tidak boleh lagi berkeliaran di jalan raya. Pertanyaan saya adalah siapa pihak yang menentukan bahwa kendaraan ini sudah memang tidak wajar lagi. Ini siapa yang menentukan ini, bukan soal cc tapi usia daripada kendaraan ini.

Itu tambahan dari saya Ibu Menteri dan Bapak Menteri.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Prof. Hendrawan.

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Terima kasih Bapak Ketua.

**Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati dengan segenap jajarannya,  
Bapak Menteri Perindustrian yang saya hormati dengan segenap jajarannya.**

Bapak Menteri Perindustrian ini secara khusus mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan kami, dengan kita, karena bukan hanya alumnus KOMISI XI DPR RI tetapi juga alumnus Komisi VI DPR RI dan Komisi VII DPR RI sebelumnya. Di Komisi VI DPR RI selama 5 tahun dengan saya dan melahirkan Undang-Undang Perindustrian, selain Undang-Undang Perdagangan tentu saja.

Hanya laporan untuk Bapak Ketua Umum, dari 9 anggota hanya 2 anggota Poksi Golkar yang hadir. Mohon ini dipertimbangkan dalam pengisian jabatan-jabatan yang akan datang, karena Undang-Undang MD3 yang baru sudah pakai system proporsional dalam pengisian jabatan alat kelengkapan dewan. Oh di Dapil, kalau di Dapil sendiri-sendiri urusannya.

Baik, jadi salam kebangsaan untuk kita semua.

Yang pertama, kalau tadi Ibu Ani menyampaikan proses pengusulan PPNBM yang baru ini kesan saya lebih banyak didorong oleh Kementerian Perindustrian. Jadi pertimbangannya bukan pertimbangan finansial yang mendorong lahirnya usulan ini, tetapi pertimbangan industrial. Itu berarti sebenarnya teman-teman mungkin bisa menyoroti aspek kepentingan industrial di balik kebijakan yang akan kita telurkan ini.

Nah, dalam konteks kebijakan industrial ini kita semua tahu industry otomotif ini begitu penting. Dulu waktu saya kuliah program master ada buku James P. Womack dengan kawan-kawan "The Machine That Changed the World", mesin yang mengubah wajah dunia. Ternyata setelah saya buka industri otomotif, karena industry otomotif ini disebut the industry of industry, mbahnya industry. Siapa yang menguasai industry otomotif karena kaitan ke depan, ke belakang, ke samping demikian luas, dia akan muncul menjadi negara industry yang kuat.

Nah, itu sebabnya kita dukung kebijakan industrial yang penting, tidak ada negara kaya yang bukan negara industry, itu harus digaris bawahi. Untuk menjadi kaya kita harus menjadi negara industry prinsipnya. Nah, itu sebabnya kalau tadi teman-teman sudah mengaitkan yang tadi pertama Bapak Ecky penting, Pak Rai penting, Bapak anu penting, yang terakhir Bapak Sarmuji inovasi. Tapi sebenarnya bagaimana kemampuan kita memanfaatkan pasar negeri yang memungkinkan skala ekonomi bisa dicapai. Thailand yang jumlah penduduknya kecil bisa memproduksi lebih banyak, mengeksport lebih besar. Indonesia yang penduduknya luar biasa bahkan yang seharusnya untuk sepeda motor kalau dulu kita tidak salah langkah untuk sepeda motor roda dua seharusnya kita menjadi raja di dunia. Karena apa? Skala ekonominya terlampaui.

Nah, itu sebabnya Pak Airlangga saya sebenarnya ingin ini dengan kebijakan seperti ini arah pengembangan industrinya tadi dalam rangka memanfaatkan pasar dalam negeri yang luas seperti ini seperti apa. Karena inikan mimpi kita semua



sebenarnya, meskipun mimpi ini sering malu-malu kita sampaikan. Dulu ada mobil nasional Mobnas, ada Impresnya, terus ada lagi Keppres dan seterusnya. Inikan sebetulnya letupan-letupan mimpi kita, bahwa kita sebenarnya dalam hati kecil ingin menjadi negara yang mampu menghasilkan mobil dengan kekuatan sendiri. Kalau sekarang yang ada Bapak Airlangga itukan pabrikan Jepang dengan industry komponen yang sebenarnya kalau kita lihat kepemilikannya juga dari Jepang, apakah itu Kan Kaisa ataupun Dokrit Kan Kaisa. Perusahaan-perusahaan yang selalu terbang sama induknya kemana pun induk pergi. Jadi itu yang saya ingin minta *judgment* dari teman-teman yang berkecimpung di Kementerian Perindustrian.

Yang kedua, kalau dari segi keuangan timnya Ibu Ani. Kalau penerimaan negara naik berarti tabungan masyarakat berkurang. Iya dong, karena saving rumusnya  $why \text{ minus consumption minus tax}$ . Nah, Pak Ecky karena mikro pendekatannya wah ini bukan mikro saja sebenarnya, ini dikaitkan dengan aspek keadilan, makro juga betul tapi saya hanya tadi karena Bapak Ecky sudah langsung ke cc-cc.

Nah, kalau dari pihak DPR RI kalau ini konsultasi maka DPR RI karena ini orang politisi maka arahnya adalah kita buat pasar bergensi semahal mungkin. Jadi Ibu Ani, orang-orang yang ingin bergaya bergensi kita buat mahal, harga gensi mahal. Nah, mobil cc-nya tinggi itu sekarang symbol gensi. Contoh saya pakai Kijang 2500 cc mau masuk bandara parkir saja diusur, padahal saya sudah bilang itu ada lambing DPR RI, tapi Bapak JP tidak ada simbolnya karena 6000 cc bisa. Tapi Ibu Ani, ini kalau 3000 cc di bawah ini di-*gebyah uyah* sama ada *sorry I have to say*, ini ada rasa keadilan yang mungkin sama dengan cukai rokok ini Kementerian Perindustrian kan dengan kami bicara terus. Kalau cukai rokok disederhanakan korban pertama adalah perusahaan-perusahaan kecil itu. Nah, dengan ini mari kita buat pasar gensi mahal, tetapi untuk yang di bawah kita beri harapan bahwa kita masih berjuang bersama-sama untuk keadilan kita cermati lagi apa yang sedang kita bicarakan hari ini.

Saya kira itu saja dan terima kasih, salam kebangsaan.

#### **KETUA RAPAT:**

Pecinya manteb ini Bapak Profesor.

Nanti surat suara tidak ada photo Pak, hanya nama saja.

Ibu Tutik, silakan Ibu Tutik.

#### **F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi XI DPR RI beserta seluruh Anggota Komisi XI DPR RI,**

**Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati dengan segenap jajarannya,**

**Bapak Menteri Perindustrian yang saya hormati dengan seluruh jajarannya.**

Mencermati usulan Pemerintah terhadap perubahan skema pajak penjualan atas barang mewah, tentu kami juga mempunyai pandangan yang sama dengan Pemerintah. Diantaranya, yaitu mengurangi Co2 untuk kendaraan bermotor, memberikan dukungan regulasi dan insentif fiskal kepada industry otomotif khususnya kendaraan ramah lingkungan. Kemudian Pemerintah juga ingin mengamankan penerimaan negara dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan kepada konsumen, kepada produsen kecil khususnya produsen kendaraan umum yang masih beremisi tinggi.

Tentunya disini saya sangat menghargai sekali atas bersinerginya Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian selaku pemangku kebijakan di dalam usulan skema pajak penjualan atas barang mewah. Disini ingin saya menyampaikan sedikit, bahwa ada aspirasi dari moda transportasi darat yang kebanyakan bahkan hampir 100% masih menggunakan bahan bakar fosil. Untuk sementara konversi dari bahan bakar minyak fosil ke gas belum siap. Jadi mungkin disini juga saya ingin bagaimana kebijakan itu nanti Ibu juga komunikasikan dan agar bisa berkolaborasi nanti kebijakannya dengan Kementerian teknis terkait.

Usulan daripada moda transportasi darat adalah bahwa untuk truk pengangkut barang sembako untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar bahan bakarnya masih disubsidi. Kemudian bus sebagai angkutan massal juga mohon agar bahan bakarnya masih disubsidi.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak JP.

#### **F-PD (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan-rekan yang kami hormati,  
Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat sore, selamat bertemu kembali.**

Ini konsultasi, karena ini Rapat Konsultasi maka kami juga ingin tahu ini kebijakan ini ingin diterapkannya kapan. Dari sisi *time frame*-nya ini kapan mau diterapkan. Dari sisi argumentasi-argumetasi yang disampaikan pasti ada sisi plus dan sisi minusnya.

Kita ingin mengingatkan yang pertama, ini insentif versus barrier, ada yang dapat insentif, ada yang kena .... Dari sisi industrinya keberpihakan ini kepada siapa, pasti ini akan mempengaruhi pasar. Yang merasa barrier akan memanuver untuk

kepentingan pencegahan barrier-nya, yang insentif akan bergembira ria dapat insentif, ini masalah *real business* ini yang harus dihitung betul-betul. Ini kita di tahun hitung-hitung juga, apalagi kita di tahun, di bulan-bulan kapitalisasi, ini masuk di bulan kapitalisasi ini. Nanti yang barrier, kapitalisasi disinsentif, yang insentif mengkapitalisasi. Saya tanya waktunya karena ini sensitive waktu ini.

Dari sisi insentif, dari sisi perpajakan dulu ya. Perpajakan apapun keputusan yang kita ambil berpihak kepada siapa, dua-duanya akan kena insentif apa barrier. Karena disisi yang satu kita dihadapkan pada isu-isu menurunkan pajak, bahkan menghilangkan pajak yang hangat sekarang ini untuk kepentingan penerimaan pajak jangka panjang versus ada yang ingin supaya kita saat ini di samping mendorong perekonomian kita, tax revenue-nya juga naik untuk kepentingan belanja pembangunan. Semuanya benar ini, tapi kapan dia benar dan relevan dengan waktunya. Ini yang harus kita pertimbangkan baik-baik.

Sama halnya juga insentif untuk industrinya, jangka pendek, jangka panjang, keadilan, keberpihakan, sama saja ini dua-duanya benar tapi dia relevan tidak dengan waktunya. Tadi Profesor Hendrawan bilang ini bisa juga terjadi *sitting*, bukan soal gengsi ini *sitting habit*, pakai mobil dengan cc gede ke mobil cc rendah ini *sitting habit*. Akibatnya apa? Di mana saat kita sedang mengintrodusir pembangunan public mess transport dihadapkan dengan personal vehiacle, jadi tabrak lagi kebijakan. Nanti kena disinsentif dikapitalisasi secara politik. Ini waktu-waktu penafsiran ini sangat sensitive, semua tujuan baik bisa dilihat dari *the other site of the coin*. Kami ingin mengingatkan betul-betul terkait dengan ini.

Dari sisi keadilan semuanya terjustifikasi dengan baik dalam dua kelompok, insentif dan barrier. Nah, kembali kepada pertanyaan saya secara singkat. Pembahasan kita saat ini bisa saja setelah kita rapat ini ramai didebatkan di sosial media dan di televise, Pemerintah tidak berpihak dan Jokowi gagal dan seterusnya. Ini sensitive ini Pak, *timing*-nya ini sangat sensitive. Saya secara konkrit saja mengusulkan kami mendengar, memahami, memaklumi ini keputusan ada di Pemerintah akan tetapi tolong membahas ini setelah Pemilihan Umum. Isu-isu pajak dekat sekali dengan isu daya beli masyarakat. Isu pajak dekat sekali juga tentu dengan isu pembangunan, dua sisi yang bisa bertabrakan. Isu industrialisasi, peningkatan sebagai mbahnya industry juga iya tapi dia dekat juga dengan kebijakan Pemerintah yang bisa bertabrakan dengan mess public transport yang sangat ini sedang gencar-gencarnya kita kembangkan.

Nah, saya hanya menyarankan dari sisi *time frame* karena ini konsultasi, maka kami dapat memahami ini dan mengusulkan untuk diterapkan ini setelah Pemilhan Umum, cuma 38-39 hari dari sekarang barangkali.

Itu barangkali secara konkritnya yang bisa kami sampaikan. Jadi dia political sensitive, bukan saja penerimaan negara, bukan saja industry yang penting saat ini tetapi sensitive politiknya juga sangat besar. Saya secara pribadi meyakini sebelum ini dibahas, show room sudah ribut duluan kok. Iya ini show room sudah ribut, daya beli turun, tidak laku barang, ekonomi macet, semuanya dikapitalisasi secara politik, gagal Pemerintah. Terlepas disisi yang lain penerimaan pajaknya naik.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Ijin, Bapak jangan lupa Bapak bagian konsorsium.

**F-PD (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Mengerti, justru karena itu makanya kita sampaikan. Ini terbuka ngomong di DPR RI ini, karena apa? Untuk mengatasi isu yang dikapitalisasi secara keliru kepada publik. Ini bukan soal benar dan salah, ini soal perasaan, persepsi yang dibangun menggugah perasaan. Efek secara finansial, secara tax tidak besar ini Pak, tetapi seara politik perasaan menjadi besar.

Ini yang ingin kita ingatkan bahwa demi kepentingan semuanya untuk kita perhatikan karena jangan sampai menambah bensin di api yang sedang terbakar. Itu saja yang kami sampaikan, mohon diputuskan secara bijak. Saya tidak tahu ini kapan, tetapi saya tentu dengan penuh harapan, kalau ditanya wartawan, Pemerintah sedang pelajari kok ini. Kalau ini bermanfaat untuk negara pasti dilakukan diambil keputusan untuk berpihak kepada rakyat untuk keadilan. Pasti itu kebijakan Bapak Jokowi, pasti itu kebijakan Bapak Menteri dan Ibu Menteri saat itu, pasti ini. Tapi jangan sampai nanti ini dl goreng-goreng menjadi masakan yang tidak enak disantap.

Itu saja yang kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi saya rasa inikan sudah dipikirkan cukup lama, nanti *timing* Pemerintah akan jauh lebih tahu kapan harus diluncurkan.

Saya persilakan Ibu Indah.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya senang karena pada kesempatan kali ini tidak sesuai dengan apa yang saya prediksi sebelumnya, rapat ini akan sepi akan tetapi ternyata ini cukup banyak kawan-kawan Komisi XI DPR RI yang hadir memberikan apresiasi seluruh kawan-kawan saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Karena mungkin topiknya juga bagus dan yang hadir mungkin salah satunya selain Ibu Menteri Keuangan adalah sahabat kita Ketum Golkar tetapi lebih daripada itu adalah beliau adalah alumni dari Komisi XI DPR RI Bapak Airlangga yang tadi malam begitu hangat dan santum menyapa kami di group WA, masih ada di group WA kami. Beliau bilang “besok akan hadir disini”, langsung saya pesan tiket tadi pagi untuk bertemu dengan beliau, saya dari Surabaya. Saya senang bisa berada disini bersama dengan kawan-kawan karena ini adalah saat-saat dimana sebenarnya di DPR RI ini kawan-kawan semua pada lelah semua, berkulat di daerah pemilihan masing-masing, bukan masalah menang atau

kalah tapi itu karena harga diri bagaimana kita berjuang disana masing-masing. Dan kita apresiasi bagi mereka yang masih meluang waktu untuk hadir disini.

**Ibu Menteri dan Bapak Menteri yang sangat saya hormati bersama dengan seluruh jajarannya.**

Sebenarnya apapun yang dikerjakan oleh Pemerintah kami semua paham, tujuannya adalah untuk kembali hasil atau tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Dan tadi disampaikan satu kalimat yang tadi saya langsung tersirat dan langsung ingin ambil ikut berbicara pada kesempatan kali ini, meskipun ini sifatnya konsultasi tapi kami senang karena kami sempat diberikan kesempatan untuk mendengar sebelum PP ini diluncurkan.

Tadi Mas Sarmuji sempat menyampaikan kata pelit insentif, saya pikir itu perlu dipikirkan juga oleh Pemerintah dalam hal ini memberikan insentif khususnya masalah perlakuan atau *treatment* kepada masyarakat. Tadi Bapak Prof. Hendrawan mengatakan, Bapak Johnny juga mengatakan bahwa isu atau bukan isu ya ini sebentar lagi mungkin Peraturan Pemerintah ini akan dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan kan pasti rumusan-rumusan skema sudah beredar. Dan kemudian sekelompok masyarakat tentu ada yang menerimanya dengan baik, ada yang kemudian resisten. Dan kalau saat ini *timing*-nya adalah *timing* politik, maka kadang-kadang perspektif yang diambilnya itu bukan dari hal yang objektif tetapi lebih ke subjektifitas. Itu saya pikir juga wajar saja dan sebagian masyarakat tentu sudah menganggap bahwa ini akan memberatkan atau tidak *fair* bagi sekelompok masyarakat tertentu.

Usulan untuk supaya tadi Bapak Agung Rai mengatakan, benar sih di jalan kita merasa agak sedikit sempit. Di Bali juga pasti, di Surabaya juga, apalagi akhir-akhir ini. Nah, ini bertolak belakang dengan kami para politisi, yang akhir-akhir ini memang sering berkumpul dengan kawan-kawan, berkumpul berdasarkan hobby atau komunitas. Mobil-mobil tua itu berkumpul semua, kelompok-kelompok viar, kemudian ada Honda Civic dan sebagainya itu banyak sekali itu kalau Sabtu Malam Minggu itu di Surabaya ramai sekali. Dan itu kalau kemudian dibatasi tahun pun seandainya itu bukan kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang berlaku itu pasti ada gejolak lagi. Hal-hal seperti itu kami mohon juga juga dipikirkan.

Untuk asas keadilannya tadi sudah, kemudian asas kepentingan yang lain, yaitu kalau kita bicara tentang upaya Pemerintah untuk meningkat industrialisasi berpihak kepada sana tentu kita senang karena ada beberapa aspek yang penting di industry, yaitu penyerapan tenaga kerja di sana. Kemudian kalau sudah penyerapan tenaga kerja tinggi kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan dan kemudian penganggaran, itu semua hal-hal yang positif dan baik. Dan tentu terakhirnya nanti penurunan angka kriminalitas.

Nah, saya pikir hal-hal seperti itu yang tetap saya berharap Pemerintah konsen bersama dengan kami, karena kami akhir-akhir inikan selalu mendapatkan masukan. Bertapa masyarakat kita yang merasa agak sedikit beban berat bukan karena ekonomo yang lesu ini tentu bukan karena sebab yang terlalu menurunnya

perekonomian tetapi saya pikir juga faktor *wait and see* di masa-masa politik seperti ini dan itu membuat beberapa sektor merasa agak sedikit turun dan mungkin ada sedikit keberpihakan atau tidak pelit insentif tadi bagi kawan-kawan kami, kawan-kawan khususnya pelaku usaha yang harus mendapatkan sedikit perlakuan khusus dengan membangun situasi yang nyaman, situasi yang aman bagi mereka untuk tetap kita gunakan sebagai alat untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi mohon dipikirkan mengingat disini ada berkumpul Bapak Suhastio dari BKN yang menetapkan target-target pajak selama ini, ada Dirjen Pajak, ada Dirjen Bea Cukai yang semuanya ada tulang punggung keuangan negara.

Saya tahu bahwa dengan keuangan negara yang sumber penerimaannya semakin banyak terutama dari PPNBM ini, kami sepakat saja apalagi dasarnya tadi bahwa PPNBM dikenakan terhadap barang yang bukan kebutuhan pokok, itu sudah benar. Kemudian dikonsumsi oleh golongan tertentu saja, dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan hanya untuk menunjukkan status, sepakat saja ini dikenakan PPNBM. Maka kami mendukung tetap juga harus memikirkan dampak lain diluar kelompok masyarakat yang ada di kelompok ini tadi yang menunjukkan status. Saya begitu mengetahui atau saya tidak menguasai dan tidak pernah tahu tentang cc mobil, saya otomotif sama sekali tidak mengerti. Yang penting saya naik mobil itu dingin dan yang kedua ada musiknya, sudah itu saja. Saya mau naik apapun tidak masalah, mau catnya seperti apa, mobilnya jenis apa, yang penting ada ac dan ada musik cukup. Nah, hal-hal seperti itu saya tidak mengerti tapi yang penting dalam keputusan nanti ini tentu ada kelompok lain dari masyarakat yang tidak tergolong di dalam status, kemudian berpenghasilan tinggi dan barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Jadi mungkin dipikirkan *equa treatment*-nya agar semuanya merasakan bahwa kebijakan Pemerintah ini dikeluarkan bukan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara saja tetapi semuanya berjalan. Industrialisasi meningkat, ekspor meningkat, dan kemudian tentu berdampak kepada penerimaan negara yang juga akan meningkat dan tentu saja tadi yang sangat penting ada *rejusing* atau pengurangan terhadap polusi dan tingkat emisi Co2. Saya sepekat dengan itu tetap kami mohon pada kesempatan kali ini mohon kita berpihak benar kepada pelaku industry, pelaku usaha agar mereka bisa merasa nyaman dan aman untuk berusaha di negeri tercinta kita ini. Tidak merasa resah dan mereka boleh menjadi harapan kita untuk khususnya untuk penyerapan tenaga kerja.

Demikian Pimpinan dari saya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Yang terakhir Ibu Elviana.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Perindustrian beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Memang semenjak reses kalau bagi saya ini rapat pertama, karena rindu dengan teman-teman dan Ibu Menteri dan Bapak Menteri.

Pertama, sifat rapat kita kan konsultasi, kita tidak dalam posisi menyetujui dan menolak. Apapun ceritanya nanti bunyinya keputusan ini sudah dibicarakan dengan DPR RI, jadi ada efek-efek kita juga. Oleh sebab itu, Ibu Menteri dan Bapak Menteri, saya ingin paham betul seperti apa sebenarnya yang akan diberlakukan ini.

Pertama, soal perubahan kapasitas mesin menjadi konsumsi bahan bakar, tingkat emisi Co2 karbon dioksida. Kita kan tahu semua sekarang mobil yang harusnya pakai bensin, mobil rakyat yang banyak pakai solar, sekarang dua jenis BBM inikan hilang di pom bensin, hilang di pasar. Paling solar itu cuma 1 jam buka, setelah itu mulailah Dexlite. Bensin paling lama 1 jam habis itu bensin habis keluarlah yang hanya premium.

Nah, kalau dibuat acuannya nanti konsumsi bahan bakar dianggapnya pakai Dex itu pajaknya lebih tinggi, tentu saja ini sebuah ancaman bagi masyarakat banyak. Kemudian saya mungkin karena orang Jambi tidak banyak orang kaya disana, yang saya tahu kelompok mobil masyarakat itu Innova ke bawah atau Fortuner ke atas. Kalau lihat toke-toke Fortuner mobilnya, tetapi kalau baru kaya sedikit Avanza, kaya sedikit lagi Innova. Lebih banyak orang mobilnya Avanza, Innova ini. Nanti yang mereka berdua ini kena tidak dengan perubahan pajak ini. Kalau yang punya Fortuner pasti toke sawit, toke karet, mungkin tidak begitu inilah soal pajak, naik berapa puluh ribu pun.

Kedua, yang harus kita pikirkan sekarang mobil dulu motor ya, motor dibilang orang pakai motor orang mampu. Setelah kita lihat orang pakai motor, tukang sayur beli motor karena itu merupakan alat transportasi kita menganggap motor bukan barang mahal lagi. Sekarang bergeser Ibu Menteri, coba kita ke Bandung atau ke beberapa termasuk ke daerah saya, mobil itu untuk jualan sekarang, jualan sepatu di pinggir jalan. Dan jelas ini pasti mereka kredit bukan mereka punya mobil setelah urusan perut mereka selesai.

Nah, apakah nanti yang begini-begini juga kena dengan perubahan pajak ini. Jadi ringkasnya seperti itu Ibu Menteri dan Bapak Menteri, kalau bagi saya dari PPP saya juga khawatir ini menjadi zaman naik, listrik naik, BBM naik, pajak naik. Mungkin bagi saya *timing*-nya juga kurang pas, semoga ini tidak diliput kalau memang ini kita

mau gelontorkan habis Pemilu ya habis Pemilu lah ini dibicarakan.

Jadi begitu Pimpinan, sekali lagi saya benar-benar berharap walaupun mengenakan perubahan-perubahan yang punya mewah ke atas mungkin tidak masalah.

Dan yang paling penting juga diperhatikan Ibu dan Bapak Menteri, kalau mobil truk itukan mobil usaha. Jadi terhadap mobil-mobil usaha mungkin tidak apa-apa dikenakan pajak tapi seperti usaha batubara misalnya, truk itukan mengangkut sawit dan batubara. Tetapi mobil-mobil pribadi sekarang sudah berubah fungsi menjadi mobil untuk alat mencari sesuap nasi.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, sudah tidak ada lagi ya.

Baik, sekarang jam 15.53 WIB kita bisa selesai di 16.30 WIB.

Mungkin saya berikan kepada Pemerintah untuk memberikan penjelasan, setelah itu kita ambil kesimpulan terhadap rapat ini.

Kami persilakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian.

#### **MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Baik, Pimpinan.

Mungkin sebagian besar yang tadi ditanya mengenai masalah masing-masing kualifikasi dari mobil nanti Bapak Menteri Perindustrian. Pertama, mengenai *timing* Pak Johnny ini sebetulnya baru akan berlaku tahun 2021. Kita sudah melakukan konsultasi dengan para pelaku industry, secara cukup intensif. Jadi memang tujuannya adalah memberikan waktu kepada para indusri untuk memiliki *adjustment*. Jadi dua tahun ini memang disepakati untuk memberikan kesempatan kepada industry dalam negeri di dalam menyesuaikan teknologinya. Dengan demikian mereka dapat memenuhi syarat untuk bisa mengikuti tarif PPN yang lebih rendah.

Kita juga di dalam mendesain ini untuk skema baru yang dalam hal ini cc tadi yang disampaikan oleh Bapak Ecky dan yang lain-lain mengenai masalah keadilan dan yang lain-lain sebetulnya secara implisit juga sudah dipertimbangkan, yaitu kalau cc-nya semakin besar berarti dia emisinya semakin tinggi. Dan oleh karena itu, dia akan mendapatkan tarif lebih tinggi. Kalau dia cc-nya semakin kecil, maka emisinya lebih kecil dan oleh karena itu tarifnya lebih rendah.

Oleh karena itu, sebetulnya itu *ter-capture* meskipun di dalam tabelnya terlihat seperti hanya ada dua kelompok, yaitu yang di bawah 3000 dan di atas 3000. Tadi Bapak Menteri Perindustrian juga menyampaikan kalau untuk yang sangat besar seperti mobil yang sangat mewah ini mungkin kita akan tetap memberikan tarif yang



125% seperti Lamborghini dan yang lain-lain mungkin tidak perlu untuk diturunkan karena tadi efek dari sisi masalah persepsi dan keadilan.

Untuk skema ini sebetulnya masalah penerimaan negara bukan merupakan masalah utamanya. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Agung Rai dan lain-lain untuk memberikan insentif, jadi ini tujuannya adalah lebih untuk merespon bagaimana instrument fiskal bisa menjadi instrument untuk bisa mendorong industrialisasi terutama di bidang otomotif di dalam rangka untuk ekspor. Nanti mungkin dari Menteri Industri bisa menyampaikan strategi industrialisasinya. Namun, memang logika dari awalnya adalah ini bukan tujuannya untuk mendapatkan penerimaan negara, tapi justru instrument perjalanan dipakai oleh Kementerian Industri di dalam rangka mendorong industrialisasi, sehingga di Indonesia akan lebih banyak muncul industry tadi substitusi impor untuk part-nya maupun di dalam rangka untuk passenger car yang memang dari sisi volume di dalam negeri cukup besar, sehingga bisa tertopang skala ekonomisnya dan kompetisinya sehingga mereka juga bisa masuk penetrasi ekspor.

Ini yang menjadi logikanya sehingga memang kalkulasi dari penerimaan perpajakannya bukan merupakan menu yang utama tapi lebih sebagai instrument mendorong industrialisasi. Nah, dengan demikian saya mungkin memberikan kepada Bapak Menteri Industri untuk menyampaikan tapi kami tegaskan bahwa pertama ini tidak akan berlaku *immediately*, berlaku tahun 2021 sesuai dengan pembahasan selama ini dengan para pelaku industry untuk memberikan waktu.

Dan tujuannya adalah instrument perpajakan di dalam rangka untuk mendorong industrialisasi dari otomotif di Indonesia dan untuk bisa mendorong ekspor lebih tinggi.

Mungkin Bapak Airlangga untuk bisa menyampaikan.

#### **MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Terima kasih Ibu Menteri Keuangan.

#### **Bapak dan Ibu yang kami hormati.**

Mungkin kami sedikit bercerita mengenai kebijakan industry terkait dengan otomotif. Di periode awal di 80-an itu diadakan kebijakan yang namanya 2 box dan 3 box. Jadi mobil itu disebut 2 box itu kalau ada mesin dan penumpang plus bagasi jadi satu. Nah, kebijakan itu dipegang sampai hari ini sehingga pada waktu didorong untuk Indonesia membuat industry MPV dan SUV. Hari ini program itu itu sangat berhasil karena kalau kita lihat 9 dari 10 kendaraan yang ada berseliweran di jalan itu tidak punya bagasi semua. Nah, itu berbeda dengan yang dikembangkan di Thailand karena kita keluarga besar.

Kedua, Kementerian Perindustrian beberapa waktu yang lalu pada waktu Profesor dan saya di Komisi VI DPR RI kita luncurkan program yang namanya LCGC KBH2. Nah, KBH2 itu bea masuknya nol, PPNBM-nya nol. Sehingga kita ketahui sekarang bahwa 80% otomotif sekarang adalah KBH2, dia menyusul *market share*

daripada yang Kijang dan kawan-kawannya itu. Nah, sekarang Pemerintah akan mempersiapkan sesuai dengan *Paris Agreement*, yaitu menurunkan tingkat emisinya. Dan Indonesia ini salah satu dari dua negara yang masih menggunakan Euro 2, di mana dalam kaitan untuk meningkatkan agar mesin Euro 2 dihanti Eoru 4 maka perlu ada investasi dan ini menjadi bagian daripada membuat industry berbasis kepada emisi.

Nah, kalau ke depan itu salah satunya adalah pengembangan industry yang namanya mobil listrik. Pemerintah sedang menyiapkan Perpres, Perpres sudah diharmonisasi tetapi Perpres ini istilah sekarangnya tidak nendang kalau tidak ada fasilitas fiskal. Karena kalau kita tahu kendaraan otomotif yang namanya listrik itu biaya produksinya jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin biasa. Dan negara-negara lain memberikan subsidi. Thailand memberikan subsidi sampai 50 juta per kendaraan, Cina memberikan subsidi sampai 100 juta per kendaraan. Nah, kita tidak mau subsidi BBM diganti menjadi subsidi kendaraan. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil fiskal insentif mendorong agar industry ini tumbuh.

Nah, hari ini ada beberapa industry yang akan mempersiapkan untuk masuk ke industry mobil listrik. Dan Pemerintah sudah menetapkan target bahwa di tahun 2025 itu adalah 20% adalah mobil listrik dengan berbagai teknologinya. Nah, parbrikan-pabrikan ini siap untuk melakukan investasi bahkan ada 2-3 investor yang akan masuk tetapi tentu menunggu kebijakan Pemerintah. Kalau menggunakan sistem PPNBM seperti sekarang maka sampai kapanpun mobil sedan diproduksi dan mobil listrik tidak punya insentif untuk dibuat di Indonesia. Nah, ini kita bersaing dengan Thailand dan India, tetapi kalau kita sudah melakukan kajian kalau ini kita lakukan maka mereka akan komit untuk invest di Indonesia tahun 2021 akan siap produksi.

Oleh karena itu, kami *push* kebijakan ini bahwa kebijakan ini secara politik membuat Indonesia siap memasuki mobil listrik dan ini menjadi hal yang sangat didorong oleh berbagai perguruan tinggi dan kami sudah melakukan study, baik itu perguruan tinggi dan yang lain bahwa mobil listrik tentu akan dari segi *operating cost* jauh lebih murah. Dan dari segi emisi jauh lebih rendah, sehingga dampak terhadap penerimaan pajak terhadap *operating cost* itu akan lebih menguntungkan. Apalagi dari segi emisi, apalagi ke depan mobil listrik itu juga bisa digunakan sebagai kendaraan untuk pembangkit listrik di daerah-daerah bencana. Jadi mobil listrik itu bisa bolak balik, dia bisa dipakai untuk nge-charge tetapi di lain pihak dia bisa melistriki rumah tangga.

Nah, teknologi-teknologi ini yang kita ingin ikuti dan salah satunya adalah dengan kebijakan ini. Dan kami juga sudah melihat bahwa untuk kendaraan-kendaraan yang super mewah, tadi bicara dengan Ibu Menteri Keuangan kita bisa bawa kendaraan super mewah itu rata-rata di atas 5000 cc dan biasanya emisinya tinggi kita berikan charge PPNBM yang lebih tinggi. Tetapi untuk kendaraan-kendaraan biasa karena kita dorong supaya kita bisa dalam dalam tanda petik mengambil alih hak otomotif dari Thailand ke Indonesia, karena kita sudah punya basis domestic kuat dan sekarang kita juga menjadi salah satu eksportir ke Philipina dan Vietnam yang cukup besar, bahkan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia lebih

besar daripada yang induknya. Ini Indonesia akan seperti di industry sepeda roda dua, di mana kita sekarang sudah menjadi produsen dunia, memproduksi sudah ekspor lebih kepada 100 negara dan kita juga sudah memproduksi 6,5 juta motor. Kita memproduksi 180 juta ban motor, kita memproduksi 18 juta ban kendaraan roda empat, dan Indonesia juga sudah memproduksi katakanlah ban untuk truk sebesar 5 juta.

Jadi seperti tadi seperti Profesor bahwa industry otomotif itu menjadi salah satu penggerak dari industry. Hari ini kita sudah punya di baja yang merupakan bahan baku dari industry. Jadi pendalamannya sudah sangat dalam, baja sudah ada posko, kemudian kaca sudah dalam negeri, kemudian ban kemarin salah satu *player* dunia Michelin sudah buat sentetik raver dan baru ekspansi dengan mengambil alih multi strada dan ini akan terus diekspansi dan akan dibuat ban untuk pesawat terbang, jadi *retrading*. Kemarin kami sudah bicara bahwa mereka juga akan membawa teknologi, karena teknologi hanya dimiliki 2-3 perusahaan, mereka juga akan *retrading* dan ini akan menjadi solusi untuk publik, karena ban semakin besar, karet alamnya semakin banyak. Nah, ini sesuai dengan harapan petani karet.

Jadi memang kebijakan ini tidak akan merugikan siapa pun karena ini juga kaum milenial menunggu kapan mobil listrik, motor listrik masuk dan dengan ini maka ini merupakan suatu program. Masuk itu untuk mengembangkan *market share* sehingga bisa diproduksi di Indonesia. Dan kami sudah menerima surat, Bapak Presiden sudah menerima surat bahwa eksisting manufaktur, eksisting mobil, perakitan mobil juga akan membuat di Indonesia dan dalam negosiasi dengan Pemerintah Australia kita dibuka jalan *local content* 35%, padahal *local content* kita sudah rata-rata mobil nasional itu sudah 80%, sehingga tentunya dengan begitu didorong mobil listrik maka pasar Australia otomatis akan terbuka.

Nah, itulah rencana Pemerintah dan dalam waktu 2 tahun seluruh mesin akan menyesuaikan. Kalau mereka emisinya tinggi maka bea masuknya lebih tinggi, emisinya rendah mereka mendapatkan insentif disana.

Demikian, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Menteri dan Bapak Menteri.

#### **F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Interupsi sedikit Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan.

## F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Ada perlu penjelasan Pimpinan.

Saya Bapak Prof tadi bilang saya dari mikro ke makro, Profesor dari makro ke mikro, ujungnya Profesor nanya juga tentang cc gitu.

Baik, saya konfirmasi saja ini pada slide berjudul perbandingan skema PPNBM, PPNBM adalah Pajak Penjualan Barang Mewah ya bukan bea masuk. Di sini di dalam skema yang saat ini KBH2 atau LCGC dulu waktu di *launching* itu 0% tarif eksistingnya. Kemudian yang di bawah adalah 3% tentu artinya LCGC akan mendapatkan disinsentif, kira-kira begitulah kedepannya. Itu yang sebetulnya kenapa saya tadi omongin dari keadilan dan kemudian makro ke mikro. Saya ingin menjelaskan biar *fair* saja bahwa LCGC akan mendapatkan disinsentif, kira-kira begitu.

Boleh satu lagi Bapak Menteri sebentar, sebetulnya tidak bisa memversuskan. Kita sesungguhnya ingin memberikan insentif, makanya saya memberikan sebuah solusi tadi. Solusinya adalah tadi terkait dengan cc itu menjadi penting, karena untuk bisa mengkomunikasikan terkait dengan keadilan, kemudian terkait dengan kebijakan LCGC menjadi penting. Kenapa? Kita mau memposisikan mereka seperti apa ke depan, karena mereka sudah berusaha berinvestasi juga disini, *local content*-nya juga sudah banyak. Dan kita pahami penggemarnya tadi kalau menurut Ibu Elviana itu penggemarnya kelas petani bukan kelas toke. Itu konfirmasi pertama. Yang ingin saya tanyakan apa betul yang dimaksud dalam slide seperti itu dibacanya.

Yang kedua, terkait dengan kenapa saya tetap mengusulkan di dalam slide terkait dengan slide ketujuh. Tetap cc itu walaupun tadi Ibu Menteri sudah mengatakan secara implisit itu sebetulnya cc-nya masuk karena berarti emisinya menjadi besar. Saya rasa di dalam ketentuan hukum, produk hukum itu harus .... Jadi masukin saja tidak ada masalahnya, semakin besar cc semakin tinggi tarif pajak itu masuk dalam usulan perubahan tersebut. Jadi artinya masih masuk menjadi prinsip pengenaan, tetapi ditambah semakin rendah emisi semakin rendah tarif pajak, jadi *combain* gitu loh. Jadi itu unsur keadilannya dapat, *policy* tentang LCGC juga akan dapat, dan seterusnya. Tetapi mendukung industrialisasi yang ramah lingkungan juga dapat, jadi masukin saja, sehingga apa? itu akan kaitan dengan yang slide nomor 9 akan ada kolom terkait dengan cc. Kenapa ini menjadi penting? karena bisa dibayangkan terkait dengan masalah *fuel consumption*, itu tidak mudah dan bahkan setiap pabrikan sendiri itu berbeda cara pandang memandang *fuel consumption ini*, *misurement*-nya apa padahal di dalam teori keuangan Ibu, apalagi keuangan negara ini namanya *misureble* dan *certain* itu penting. Sedangkan hanya mendasar kepada *fuel consumption* saja kemudian tingkat emisi dan seterusnya itu sangat berubah-ubah. Tadi katakanlah walaupun ada sebuah ukuran benar terkait dengan dengan *fuel consumption*, padahal berbeda-beda setiap ukuran *fuel consumption* itu, apakah akan *test track* dulu dan sebagainya itu belum ada saya baca. Saya bukan penggemar otomotif Pak, terus terang tapi karena ini sudah mengajukan rapatnya sebelumnya, jadi saya terpaksa belajar otomotif saya betul-betul untuk memahami ini.

Nah, itu di seluruh dunia tidak ada yang membuat standar yang baku, mengukur pasti bahwa ini adalah sebuah produk segitu. Yang kedua, itu tergantung perawatan juga, makanya mengukur emisi ada di beberapa negara yang memberlakukan harus diperiksa terus. Ada yang perawatannya asal-asalan dan sebagainya, tingkat konsumsi bahan bakarnya ada premium, pertalite, dan sebagainya berbeda-beda mempengaruhi emisinya. Itu sangat *complicated*, padahal saya ulangi terkait dengan persediaan keuangan negara itu tentu ada miserable harus pasti Pak, kemudian juga harus ada kepastian.

Jadi sebetulnya usulan saya sangat konkrit Pak, konsep dasar saya sependapat dengan Menteri Perindustrian dari awal, bahwa kita memang ke depan harus *green car*, harus ramah lingkungan, ada insentif kepada industry yang akan berinvestasi disini. Tetapi kebijakan yang terkait dengan ekspor jangan selalu dicampurbaurkan terkait dengan pasar domestic, pasar kita. Ada saya rasa pengaruh investasi itu bukan hanya soal ini, salah satunya iya fiscal policy, terkait kemudahan investasi, terkait dengan macam-macam. Saya tidak akan membahas disini, karena bukan forumnya disini. Ibu Menteri tahu persis itu, bukan semata-mata ini bahwa betul insentif fiskal merupakan alat untuk menggaet investor betul, tetapi ketika kita memperlakukan pihak-pihak yang sudah berinvestasi disini juga kita penting menghargai mereka sambil mereka *switch* selama 2 tahun tetapi ini memang bukan soal goreng menggoreng ya. Saya rasa besok juga muncul itu, paling tidak saya akan ngomong pastinya secara pribadi karena hak saya terkait dengan ini. Bukan soal goreng menggoreng ini, sebetulnya inikan masalah keberpihakan saja dan tujuan semua juga saya yakin saya berkhusnuzon berbaik sangka, saya paham secara baik, secara institusi maupun secara personal kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tetapi kita kan wajar di dalam negara demokrasi itu ada perbedaan dalam masalah pandangan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Bapak Menteri mau ditanggapi?

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Jadi pertama untuk pengujian emisi memang beberapa industry sudah mulai melakukan, terutama apabila kita dorong ke industry elektrik yang namanya cc menjadi e-relevan, karena tidak ada lagi cc karena mesinnya *totally* berubah.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Interupsi sedikit Pak.

Betul Pak, akan berukan akan menjadi e-relevan, tetapi terkait dengan kebijakan PPNBM ini, inikan terkait dengan eksisting selama 2 tahun berlaku tetap, makanya pakai cc.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Pertama, maka kita bikin klarifikasi berdasarkan emisi, ya kita bisa menambahkan itu setara dengan cc berapa atau yang lebih relevan nanti lebih tidak dikenal lagi, berbasis *horse power*, karena yang namanya mau dia mobil biasa dan mobil listrik *horse power* itu hitungannya sama. Jadi itu salah satu, kita sudah evaluasi tetapi dicari hal yang dalam tanda petik lebih umum di mengerti oleh publik. Nah, itu salah satu nanti kita dalam narasinya bisa kita siapkan.

Kemudian yang kedua, terkait dengan KBH2, memang kalau dia menggunakan emisi yang seperti sekarang dan Euro 2 dia kena 3%. Tetapi kalau dia memperbaiki itu maka nanti dia akan turun dan mereka sudah kami panggil semua dan mereka menyiapkan engine yang lebih ramah lingkungan yang bisa *confirm* terhadap program ini.

Dan yang ketiga, itu untuk membedakan antara mobil yang berbahan bakar fuel dan berbahan bakar listrik. Jadi kalau listrik dia fuel nol, maka kalau ini nanti minimal dikenakan 2%. Nah, itu yang kami bahas dengan kalangan industry.

Demikian, terima kasih.

**F-PAN (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR):**

Bapak Menteri sedikit Bapak Menteri.

Kalau energi fosil disinggung tidak disitu.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Energi fosil itu yang masuk di dalam fuel tadi Pak, jadi kami juga ada kebijakan yang namanya ke depan flexi fuel. Jadi juga otomotif flexi fuel termasuk persiapan untuk bio diesel 100% green aftur di mana Pemerintah juga siapkan supaya nanti bertahap dia akan berpindah ke listrik, akan tetapi yang combination engine juga bisa menggunakan yang namanya green aftur. Nah, mungkin dalam waktu 2 tahun Pertamina dan yang lain akan mendorong sehingga kita juga akan tingkatkan dari B20 menjadi B100.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah.

Kita masuk ke dalam rancangan kesimpulan pada rapat sore hari ini.

Tolong ditampilkan, teman-teman kalau ada yang ingin masukkan lagi tolong sampaikan usulan-usulannya.

Baik, saya bacakan.

1. Komisi XI DPR RI menyetujui perubahan skema PPNBM yang dikonsultasikan Menteri Keuangan dengan point-point perubahan sebagai berikut. Dasar pengenaan, kapasitas mesin saat ini, berubahnya konsumsi bahan bakar tingkat emisi Co2. Pengelompokan kapasitas mesin saat ini diesel 3 kelompok, lebih kecil 1500-2500, lebih besar dari 2500 cc. Gasoline 4 kelompok, lebih kecil dari 1500-2500, 2500-3000 atau lebih besar dari 3000 cc. Perubahannya 2 kelompok (lebih kecil atau sama dengan 3000 dan lebih besar dari 3000 cc). Pengelompokan tipe kendaraan saat ini sedan, non sedan, perubahannya tidak membedakan sedan dan non sedan. Prinsip pengenaan saat ini semakin besar cc semakin tinggi tarif pajak, perubahannya semakin rendah emisi semakin rendah tarif pajak. Program insentif saat ini KBH2, perubahannya KBH2 ... plug in HIV, flexi engine dan electric.

Bisa disetujui ya teman-teman?

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Dengan segala hormat menghormati teman-teman yang setuju. Saya minta PKS punya sikap Pimpinan, sebagaimana yang tadi disampaikan pertama adalah bahwa tetap dalam prinsip pengenaan memasukkan semakin besar cc semakin tinggi tarif pajaknya ditambah dengan semakin rendah emisi semakin rendah tarif pajaknya. Karena memang kan tidak juga ke depan itu semua menjadi listrik semuanya.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Semakin besar kapasitas tadi cc-nya, semakin tinggi cc semakin tinggi tarif.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Maksud saya itu tetap, jadi yang eksisting tetap berlaku ditambah dengan yang ini, paling gampang yang itu saja sebetulnya.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Kolom yang di atas itu.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Biar ngetiknya tidak susah, saya lanjutkan ya kasihan teman-teman.

Yang kedua, terkait dengan KBH2, KBH2 tetap mendapat insentif fiskal ada peluang untuk tetap 0%, bahwa kemudian nanti kita dorong mereka supaya emisinya lebih rendah setuju, tetap tetap ada dimulai dari 0%. Saat inikan biasa ada *range* dimulai dari 0% tetap 0% artinya, KBH2 tetap 0%, KBH2 yang mau mengikuti program tentunya.

Yang ketiga adalah terkait dengan bea masuk. Bea masuk itu saya tidak sependapat untuk semua disamakan. Mungkin kata-kata yang B itu tetap 0% yang mau kita program, tetap 0%.

Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bea masuk, bea masuk itu tetap sama dengan sekarang kecuali untuk produk-produk mobil listrik atau mobil-mobil yang merupakan spesifikasi program yang memang berencana diproduksi di Indonesia. Kalau nanti Bapak Johnny Plate mau, saya tidak tahu kalau yang 6000 cc kurang paham Pak, kalau saya pakainya masih 2000 cc.

Kemudian yang ketiga sudah, yang keempat terkait dengan....

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Untuk yang C itu kecuali produksi mobil listrik yang diproduksi di dalam negeri kan Pak Ecky.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Iya betul, yang akan direncanakan di dalam.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Jadi bahasanya mungkin bahwa bea masuk turun itu untuk mobil yang punya program untuk produksi di dalam negeri. Karena kalau produksi di dalam negeri memang Pemerintah tidak nol-kan Pak, jadi jangan salah baca Pak. Jadi kalau yang eksisting produksi tidak di nol-kan oleh Pemerintah, kalau sudah diproduksi dalam negeri.



**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Yang akan masuk program maksudnya.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Yang mau kita nol-kan hanya yang masuk program. Jadi itupun bea masuk sementara sampai pabriknya berdiri. Jadi itu tidak sembarang orang bisa masukin tanpa program.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Mirip-mirip dengan Timor dululah, Timorkan di 0% walaupun akhirnya tidak jadi.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Tapi komitmennya konkrit.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Saya ini karena mendadak yang keempat, saya tadi empat catatnya.

Demikian Pimpinan, kalau saya cari-cari skema cc, kelas cc-nya. Kelas cc-nya usulan kelas cc adalah tetap, ada yang 2000 kebawah, di bawah 2000 maksudnya, karena 11.999 kalau di STNK saya. Kemudian sampai dengan 3000 dan 3000 keatas, kemudian kalau mau super cars silakan itu, tapi tetap ada 2000, 3000 ini memang sangat-sangat beda sekalilah.

Saya rasa demikian Pimpinan usulan saya dengan menghormati perbedaan dengan Fraksi lain.

Terima kasih.

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Ketua, sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Mohon ditarik ke atas, dari sini saya semakin jelas tadi pada saat membaca agak kurang sedikit *clear*, saya kurang paham otomotif. Istilah-istilah tapi begitu disini

prinsip pengenaannya ini lebih mudah, semakin besar cc semakin tinggi tarif, semakin rendah emisi semakin rendah tarif. Biasanya kalau emisinya rendah itu bukan harganya mahal ya? tidak selalu.

Pertanyaan saya itu saja, biasanya kalau emisinya rendah kan lebih mahal. Terus kemudian mungkin kalau usulan saja bagi Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, kalau ini misalnya kita ambil dari perspektif penerimaan negara potensinya mungkin bisa dicukaikan, biar lebih pas pengaturannya untuk cukai.

Terima kasih.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Mas naik ke atas kalimat pertama, oke.

Begitu Pimpinan, kita kan rapat konsultasi, sepengetahuan saya tidak ada persetujuan dalam sebuah Rapat Konsultasi. Lagipula kita yang hadir ini hanya 12 atau tidak sampai 25% kita yang hadir.

Jadi pertama, apakah memang perlu diambil putusan. Yang kedua, kalau mau mengambil keputusan saya tidak bisa ikut karena saya belum lapor. Kami berempat disini dan lagi pula yang kita putuskan ini bukan persoalan biasa, persoalan pajak. Saya menunggu respon teman-teman yang lain bagaimana, kalau menurut saya dari PPP seperti itu. Cari kalimat lain yang penting konsultasi tidak mengambil keputusan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, memahami saja.

**F-PD (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Membantu Ketua, Ketum lagi, Pimpinan Rapat.

Ini gara-gara Pak Ketum ini kita panggil Ketua.

Barangkali kesimpulannya itu adalah Kementerian sudah melakukan konsultasi dengan DPR RI dengan kesimpulannya sebagai berikut, kesimpulannya saja. Tidak memahami, tidak menyetujui tapi kesimpulannya itu. Ditambahin dengan kesimpulan tadi implementasinya 2021 atau berapa itu, Peraturan Pemerintah dibuka dan

diusulkan untuk di tahun 2021 ditambah, sehingga jelas dan mudah kita jawab kepada publik.

**KETUA RAPAT:**

Usulan yang luar biasa dari ini dari Bapak Sekjen.  
Terima kasih.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Judulnya itu bukan Kementerian, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian.

**KETUA RAPAT:**

Itu diatas juga dikoreksi ke Rancangan Kesimpulan/Keputusan itu dihapus, kan ada keputusannya. Inikan berkat Ibu Elviana jadi senator ini merubah semua.

**F-PD (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Atas saja ditulis itu Rapat Konsultasi Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, 11 Maret 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut: 1, 2, 3 dan seterusnya.

**KETUA RAPAT:**

Ya sudah.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Itu judul itu sebetulnya hasil Rapat Kerja Konsultasi Menteri Keuangan.

**KETUA RAPAT:**

Jenis rapat tetap Rapat Kerja, cuma tipe rapatnya adalah konsultasi.  
Sudah ya, bisa disetujui nomor 1 ya.  
Pemerintah ada masukan?

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Tadi yang dari PKS sebetulnya yang A dan D itu sama, yang A tadi Fraksi PKS semakin cc-nya semakin tinggi tarifnya.

**KETUA RAPAT:**

Itu tidak ada perbedaan dengan Fraksi-fraksi lain itu yang pertama dan kedua sudah ada disitu.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Begini, kenapa cc-nya dicantumkan yang bawah ya, itu penegasan saja supaya menjadi lebih *clear* sebetulnya. Tadi sebetulnya memang kan secara tersembunyi, tersirat sudah ada tapi dengan saya menyatakan itu menjadi tersurat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Bisa dipahami Ibu ya, maksudnya Bapak Ecky.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Dipahami Pak.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Tapi yang A Bapak Ketua, coba dicek lagi.

Fraksi PKS meminta semakin tinggi cc-nya semakin tinggi tarif, itu semua fraksi saya dengarnya demikian.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Bukan begitu bahasanya.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Bahasanya menjadi tetap sebagai prinsip pengenaan ditambah dengan yang tadih, ditambah dengan semakin rendah cc semakin. Gituloh, dua-duanya dipakai jangan sampai saya tidak sependapat dengan Bapak Menteri Perindustrian, saya sependapat sekali terkait dengan semakin rendah emisi semakin rendah.

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Ibu Menteri, sebenarnya baik cc maupun emisi inikan bukan *mutually exclusive*. Jadi sebenarnya di tabel itu ada sesuatu yang missing, jadi di program yang baru ini cc tetap diperhitungkan tetapi ada komponen baru, yaitu emisi.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Jadi sebetulnya bisa betul Prof, jadi yang semakin besar cc semakin tinggi tarif pajak dicopy ke sebelah kanan. Dan semakin rendah emisi semakin rendah pajak.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Terima kasih Ibu Menteri, kalau begitu.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Ya, tabelnya juga sebetulnya.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):**

Ini point A PKS dihapus saja karena sudah menjadi sikap bersama.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Ya sudah, dua-duanya masuk.

**KETUA RAPAT:**

PKS tidak usah ada, point PKS-nya tidak usah ada.  
Ibu Menteri, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian untuk memperhatikan aspek keadilan, daya beli dan penghasilan masyarakat.

Tentang penerimaan negara tidak perlu ya, Ibu Menteri Keuangan kan dihilangin semua kalau penerimaannya turun juga setengah mati.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Ada juga aspek emisi gas buang karena itukan dipersyaratkan dalam hasil Koparis, jadi bukan hanya penerimaan negara tetapi juga efek target kepada pengurangan emisi. Pengurangan penerimaan pajak serta pengurangan emisi.

**KETUA RAPAT:**

Jadi nomor 2 bisa disetujui ya?  
Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan agar dengan adanya insentif pajak melalui perubahan pengelompokan PPNBM untuk kendaraan roda empat tidak akan mengurangi penerimaan perpajakan.

**MENTERI PERINDUSTRIAN (AIRLANGGA HARTARTO):**

Mungkin di atas itunya di atas saja, tidak akan mengurangi penerimaan perpajakan, bukan serta tidak akan mengurangi emisi.

**KETUA RAPAT:**

Pengurangan emisi yang atas saja, nomor 2.

Jadi nomor 2, "Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan dan Menterian Perindustrian untuk memperhatikan aspek keadilan, daya beli dan penghasilan masyarakat serta pengurangan emisi".

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Kenapa pakai "dan" segala Bapak Ketua, jadi aspek keadilan, daya beli, penghasilan masyarakat dan komitmen, misalnya pengurangan emisi atau apa begitu.

**KETUA RAPAT:**

Dan pengurangan emisi cukuplah, Pemerintah kan pintar mereka ngertilah.  
Bisa setuju nomor 2 ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan agar dengan adanya insentif pajak melalui perubahan pengelompokan PPNBM untuk kendaraan roda empat tidak akan mengurangi penerimaan perpajakan.

Bisa disetujui ya?

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Tunggu Bapak Ketua.

Terlalu ekstrim itu, dielakkan lagi sedikit tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Jadi kalau dipasang disitu tidak akan mengurangi, ini pemaksaan. "Tidak mempengaruhi penerimaan pajak".

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAMATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

Tapi pengaruh Pak, nanti.

Mungkin tidak mempengaruhi Pak.

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Terlalu halus Bapak Hatari, saking halusnya jadi tidak dibutuhkan kebijakan publik jadinya.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Tidak akan itu terkesan pemaksaan, "tidak mengurangi penerimaan pajak".

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Tidak mengurangi saja itu sudah jelas, karena kalau sekarang impor itu cuma 100. Jadi sudah pasti penerimaan pajak naik, karena nanti jumlahnya dari 100 unit menjadi 400 ribu unit. Jadi dari jumlah itu akan meningkat.

Minta judulnya saja Pak, jadi mohon judulnya ditambahkan.

**KETUA RAPAT:**

Nomor 3 kita ketok saja dulu ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Sudah, sekarang judulnya.

Judulnya di atas hasil Rapat Konsultasi terkait usulan skema PPNBM kendaraan bermotor roda empat.

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Jadi itu Menteri Keuangannya tetap itu, bawahnya saja terkait.

**KETUA RAPAT:**

Bisa disetujui ya judulnya?

Setuju ya Bapak Menteri, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Saya kira kita sudah menyelesaikan Rapat Konsultasi kita pada sore hari ini. Semoga maksud dan tujuan daripada penerapan skema usulan ini dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Kami persilakan kepada Menteri Keuangan untuk *closing remarks*.

**MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):**

**Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI.**

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas masukan-masukan dalam Rapat Konsultasi kami di dalam rangka kami untuk bisa memformulasikan kebijakan yang tepat untuk membangun industri otomotif di Indonesia. Kami tentu akan mempertimbangkan secara sangat serius berbagai masukan tadi di dalam desain akhir yang kebijakan ini baru akan mulai dijalankan tahun 2021.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian atas kehadirannya.

Dengan ini rapat saya tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.35 WIB)**

**Jakarta, 11 Maret 2019**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

**ttd**

**Drs. Urip Soediarwono  
NIP. 19620521 198203 1 001**



